Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Volume. 4, Nomor. 1 Januari 2025
E-ISSN: 2809-2392, P-ISSN: 2809-2406, Hal 384-398
DOI: https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5400
Tersedia : https://journalcenter.org/index.php/jimak

Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Syarifah Azzahra[1], Nurjannah[2*], Iskandar[3]
[1-3] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa – Aceh, Indonesia
[*]*Penulis korespondensi: nurjannah@unsam.ac.id* [2]

Abstract. *This study aims to analyze the influence of fiscal policy instruments on economic growth in Aceh Province using independent variables such as regional taxes, employee expenditure, and indirect expenditure. The data were obtained from official publications of the Central Bureau of Statistics (BPS) Aceh in the form of time series covering the period 2009–2023. The analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of Eviews 12 software to ensure accurate and reliable results. The findings reveal that, partially, regional taxes have a positive but insignificant effect on economic growth in Aceh Province. Employee expenditure also shows a positive yet insignificant effect, while indirect expenditure has a negative and insignificant impact. Simultaneously, the three independent variables do not demonstrate a significant influence on regional economic growth. These results indicate that the effectiveness of fiscal instruments at the regional level remains limited and has not been able to provide a strong impetus for economic growth. Therefore, a comprehensive evaluation of the planning, allocation, and utilization of fiscal policies is necessary to ensure that Aceh's economic development strategies become more targeted, efficient, adaptive, and capable of promoting inclusive and sustainable growth.*

Keywords: *Economic Growth; Employee Spending; Fiscal Policy; Indirect Spending; Regional Taxes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dengan menggunakan variabel bebas berupa pajak daerah, belanja pegawai, dan belanja tidak langsung. Data penelitian bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dalam bentuk data time series periode 2009–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software Eviews 12 untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Belanja pegawai juga memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan, sedangkan belanja tidak langsung justru berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas instrumen fiskal di tingkat daerah masih terbatas dan belum mampu menciptakan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, alokasi, dan pemanfaatan kebijakan fiskal sangat diperlukan agar strategi pembangunan ekonomi Aceh dapat lebih tepat sasaran, efisien, adaptif, serta mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Belanja Pegawai; Belanja Tidak Langsung; Kebijakan Fiskal; Pajak Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah parameter utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, memiliki tantangan dan potensi yang unik dalam pengelolaan kebijakan fiskalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah mengalami periode pemulihan pascakonflik, Aceh telah berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan budayanya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mencapai tujuan ini, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk memengaruhi kondisi ekonomi daerah.

Naskah Masuk: 31 Desember, 2024; Revisi: 15 Januari, 2025; Diterima: 30 Januari, 2025; Terbit: 31 Januari, 2025

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional yang signifikan termasuk pertambahan pendapatan per kapita pada suatu jangka waktu perhitungan tertentu. Menurut Kuznets dalam (Todaro, 2006) pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk memberikan lebih banyak variasi barang kepada warganya.

Menurut Yuniwinsah dalam Aji (2023) perkembangan ekonomi adalah salah satu faktor yang dianalisis dalam ekonomi makro secara keseluruhan. Proses perubahan yang terjadi dalam ekonomi suatu negara menuju kondisi yang lebih baik selama waktu tertentu disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Suatu negara dapat dianggap mengalami kemajuan jika keadaan ekonominya berubah menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dilihat melalui bertambahnya penciptaan produk industri, pertumbuhan sektor jasa, kenaikan produksi barang modal, dan kemajuan infrastuktur di negara itu.

Menurut Licolin dalam (Bahari & SBM, 2019) pembangunan ekonomi merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, proses ini dapat dianalisis baik dalam skala nasional maupun regional. Keterkaitan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangat erat, dimana pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi selama periode 5 tahun terakhir sebagaimana dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	4,14
2020	-0,37
2021	2,81
2022	4,21
2023	4,23

Sumber : BPS Provinsi Aceh 2024

Data dari Tabel 1 diatas, terlihat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berfluktuasi setiap tahunnya. Di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,14 persen, mencerminkan stabilitas ekonomi sebelum pandemi COVID-19. Sektor utama seperti pertanian dan perdagangan masih berjalan normal, dengan investasi yang relatif stabil. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan ekonomi sebesar -0,37 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan konsumsi

masyarakat, serta gangguan pada sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan perlambatan signifikan.

Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 2,81 persen yang didorong oleh stimulus fiskal, pemulihan sektor usaha, serta peningkatan konsumsi masyarakat setelah pelonggaran kebijakan pembatasan sosial. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan mencapai 4,21 persen, yang mencerminkan pemulihan lebih kuat, terutama di sektor perdagangan dan industri. Faktor lain yang berkontribusi adalah peningkatan belanja pemerintah serta investasi yang kembali bergerak. Kemudian pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat menjadi 4,23 persen yang menunjukkan stabilisasi ekonomi pasca-pandemi. Namun, tantangan seperti inflasi global, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan kebijakan fiskal tetap menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan. Berdasarkan laporan dari BPS Aceh dan Bank Indonesia, pemulihan ekonomi Aceh didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor, meskipun masih terdapat tantangan dalam sektor investasi dan ketenagakerjaan.

Kemudian salah satu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh adalah dengan pengambilan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengelola dan menstabilkan sistem perekonomian nasional. Instrumen fiskal memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, pengendalian laju inflasi, menjaga kestabilan harga, serta mendorong perluasan ekonomi tingkat sektor dan terutama meningkatkan jumlah pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan anggaran pemerintah melalui pendapatan dan pengeluaran negara, yang secara langsung berdampak pada kegiatan ekonomi. Pada sisi pendapatan, sumber-sumber yang dapat diidentifikasi meliputi penerimaan pajak, pembiayaan melalui pinjaman domestik, pinjaman luar negeri, serta fasilitas kredit yang disediakan oleh bank sentral. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, alokasi anggaran dapat mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, serta pelaksanaan transfer dana pada pihak-pihak tertentu.

Pajak merupakan komponen utama kebijakan fiskal yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dr. Soeparman Soemahamidjaja menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan yang harus dibayar, baik dalam bentuk uang maupun barang, oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penggunaan pajak ini untuk menutupi biaya dalam memproduksi barang dan menyediakan jasa bersama demi kesejahteraan warga. Pajak memberikan sumbangan yang besar pada pendapatan negara.

Ketika penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan, pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengalokasikan dana tersebut ke berbagai program prioritas. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah dirancang serta memperkuat laju pertumbuhan ekonomi.

Tax Amnesty merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pada tahun 2016-2017. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk merespon banyaknya laporan penunggakan pajak dari para wajib pajak dan tidak melaporkan jumlah kekayaan yang mereka miliki sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran pemerintah, terdapat dua variabel dalam instrumen kebijakan fiskal yaitu belanja pegawai dan belanja tidak langsung. Dengan menjaga pengeluaran negara agar tetap stabil pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Ada dua pendapat tentang dampak pengeluaran negara yang besar. Pendapat pertama menyatakan perlunya pembatasan belanja negara agar tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Pendapat pertama mengusulkan konsolidasi fiskal sebagai strategi untuk menekan defisit anggaran tanpa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Pendapat yang kedua menegaskan bahwa belanja pemerintah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi jika digunakan sebagai alat dalam kebijakan fiskal. Oleh karena itu, kita dapat melihat data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Belanja Pegawai	Belanja Tidak Langsung
2019	1.409.251.915	704.515.394	6.561.211.306
2020	1.477.991.067	63.764.801	7.772.191.996
2021	1.374.555.533	40.279.124	7.236.238.696
2022	1.717.834.522	2.672.636.563	9.853.395.736
2023	1.720.373.171	3.110.200.923	7.495.955.420

Sumber : BPS Provinsi Aceh 2024

Berdasarkan data dari Tabel 2, terlihat penerimaan pajak daerah Provinsi Aceh mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh implementasi program pemerintah berupa *Tax Amnesty*. Tingkat penerimaan pajak daerah menunjukkan kenaikan dari 1.409.251.915 (ribu) di tahun 2019, menjadi 1.720.373.171 (ribu) di tahun 2023. Peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kebijakan Tax Amnesty yang membantu meningkatkan kepatuhan pajak, mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan, dan memperluas basis pajak daerah. Hal ini menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar.

Kemudian setelah pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi di Aceh kembali pulih, meningkatkan transaksi dan konsumsi yang mendongkrak penerimaan pajak.

Jika dilihat dari total pengeluaran pemerintah, belanja pegawai juga mengalami fluktuasi dilihat dari data 2019-2023. Peningkatan belanja pegawai dari 704.515.394 (ribu) di tahun 2019, menurun menjadi 40.279.124 (ribu) di tahun 2021, dan meningkat kembali menjadi 3.110.200.923 (ribu) pada tahun 2023. Fluktuasi belanja pegawai yang besar antara tahun 2019 hingga 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19, penghematan anggaran, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Penurunan tajam pada tahun 2021 berkaitan dengan kebijakan efisiensi dan pengurangan belanja akibat kondisi ekonomi yang sulit, sementara lonjakan pada tahun 2023 mencerminkan pemulihan ekonomi dan adanya kebijakan baru yang memprioritaskan peningkatan belanja pegawai.

Sedangkan untuk belanja tidak langsung Provinsi Aceh tahun 2019-2023 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 6.561.211.306 (ribu) meningkat menjadi 7.236.238.696 (ribu) di tahun 2021, dan meningkat kembali menjadi 7.495.955.420 (ribu) di tahun 2023. Peningkatan belanja tidak langsung Provinsi Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan adanya peningkatan alokasi dana untuk program sosial, transfer ke daerah atau desa, dan pembangunan infrastruktur. Ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

Meskipun kebijakan fiskal memiliki potensi yang besar, efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fiskal di daerah ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas pengelolaan anggaran, dan ketidakpastian politik. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai peran instrumen kebijakan fiskal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sangat penting untuk dilakukan.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh"**.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menceminkan suatu proses berkelanjutan dimana kapasitas produksi dalam suatu negara mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berdampak pada naiknya pendapatan nasional dan total output yang dihasilkan oleh perekonomian. Aktivitas yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Kegiatan ini berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Suatu daerah dapat dikatakan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan masyarakatnya melebihi pendapatan pada periode sebelumnya (Pangestu, 2019).

Menurut (Boediono, 2014) pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dari bertambahnya output barang dan jasa, serta meningkatya tingkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets dalam (Sadono, 2012) pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada warganya.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi setiap wilayah dilakukan dengan cara membandingkan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah angka yang dihasilkan dari seluruh hasil dalam kegiatan ekonomi selama jangka waktu tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan harga, yakni harga konstan dan harga berlaku. Disamping itu, PDRB juga berfungsi sebagai indikator utama dalam mengindentifikasi sektor-sektor potensial di masing-masing wilayah. Pemerintah berharap agar sektor-sektor unggulan ini dapat ditingkatkan untuk efisiensi pengeluaran dan pengoptimalan outptut (Pangestu, 2019).

Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi ketika nilai nyata dari imbalan untuk penggunaan faktor produksi pada satu tahun meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan fisik dalam kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam periode waktu tertentu (Prasetyo, 2011).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan pajak dan belanja negara guna menjaga kestabilan ekonomi. Menurut teori Keynes, pendekatan fiskal yang bersifat ekspansif diyakini mampu meredam dampak krisis ekonomi melalui peningkatan belanja publik dan pendapatan negara. Ketika menghadapi tekanan ekonomi, kebijakan ini dapat digunakan untuk mendorong kegiatan investasi dan ekspor, menjaga

kestabilan harga dan nilai tukar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat efisiensi, produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan ekonomi internasional (Aruan et al., 2023).

Menurut Sukirno dalam (Rantebua et al., 2020) kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan keadaan perekonomian ke arah yang lebih optimal melalui penyesuaian komponen peneriman dan belanja pemerintah. Sebagai instrumen dalam kebijakan ekonomi makro, kebijakan ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengatur tingkat pendapatan dan pengeluaran negara secara strategis.

Kebijakan fiskal merupakan usaha yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah pendapatan dan pengeluaran negara. Secara umum, fungsi kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga kategori, yaitu penetapan target aturan, mendistribusikan pendapatan serta memberikan subsidi, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Fungsi penetapan aturan bertujuan untuk mendorong proses pembangunan nasional. Sementara itu, alokasi pendapatan dan pemberian subsidi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun fungsi stabilitas menunjukan peran strategis pemerintah dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah yang menerapkan kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi perkembangan ekonomi. Artinya, pemerintah berusaha mengarahkan ekonomi ke arah yang diinginkannya. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah juga memengaruhi besaran pendapatan nasional, lapangan kerja, tingkat investasi nasional, dan distribusi pendapatan nasional (Siswajanthy et al., 2024).

Pajak Daerah

Menurut Siahaan dalam (Saipuloh, 2021) pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Kewajiban ini muncul tanpa adanya balas jasa langsung kepada pembayar pajak, namun hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan di tingkat daerah.

Menurut Mardiasmo dalam (Miswar et al., 2021) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu ataupun badan usaha dengan sifat memaksa tanpa menerima imbalan yang setara. Pajak ini dapat dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan digunakan untuk memdanai pembangunan daerah.

Belanja Pegawai

Pengeluaran belanja daerah sangat penting bagi kinerja daerah, ini karena kompensasi diberikan sebagai imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan serta mendorong produktivitas kerja di daearah. Pengeluaran pegawai terbagi dalam beberapa kategori yaitu gaji, tunjangan, honorarium, dan vakasi (Edira, 2020).

Menurut (Sadono, 2008) pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal, yang berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ini diatur dalam dokumen anggaran belanja pegawai. Belanja ini digunakan untuk memberikan kompensasi, baik dalam bentuk uang atapun barang, kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI, anggota POLRI, dan penjabat negara, baik yang bekerja didalam negeri ataupun diluar negeri.

Menurut (Badrudin, 2012) belanja pegawai berperan sebagai sumber pendapatan bagi penerima, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa. Aktivitas jual beli dalam masyarakat terjadi melalui adanya permintaan dari konsumen, yang mendorong produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai preferensi pasar. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini membentuk dinamika kegiatan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung menurut Permendegri No. 13 Tahun 2006 adalah estimasi belanja yang tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program atau aktivitas. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang mendukung pelaksanaan program pemerintahan yang meliputi dari pembayaran gaji pegawai (pegawai negeri sipil), subsidi, belanja bunga, bantuan sosial, hibah, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga lainnya.

Menurut peraturan BPK pada tahun 2006 pengeluaran belanja tidak langsung merujuk pada belanja yang dialokasikan erat dengan pelaksanaan program-program. Kebijakan SKPD direalisasikan melalui bentuk kegiatan usaha yang dapat terdiri dari satu atau lebih aktivitas. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia diarahkan guna mendapatkan hasil yang terukur dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh SKPD. Menurut Soleh dan Rochmansjah dalam (D. Purnomo et al., 2022), belanja tidak langsung adalah jenis pengeluaran yang alokasinya tidak secara langsung terpengaruhi oleh usulan program atau aktivitas tertentu.

Belanja tidak langsung adalah jenis pengeluaran yang dialokasikan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun anggaran, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang bersifat periodik. Pengeluaran ini umumnya ditujukan untuk membiayai hak-hak pegawai

tetap, seperti pembayaran gaji dan tunjangan, serta mencakup kewajiban belanja lainnya yang diperlukan secara berkala.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data dan informasi yang diperoleh dianalisis melalui metode statistik. Variabel dependen dalam studi ini adalah pertumbuhan ekonomi, sementara variabel independennya meliputi pajak daerah, belanja pegawai, dan belanja tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2009 hingga 2023. Teknik analisis yang diterapkan mencakup Uji Asumsi Klasik (yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), analisis Regresi Linear Berganda, serta pengujian hipotesis melalui Uji T, Uji F, dan Koefisien Determinasi (Uji R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

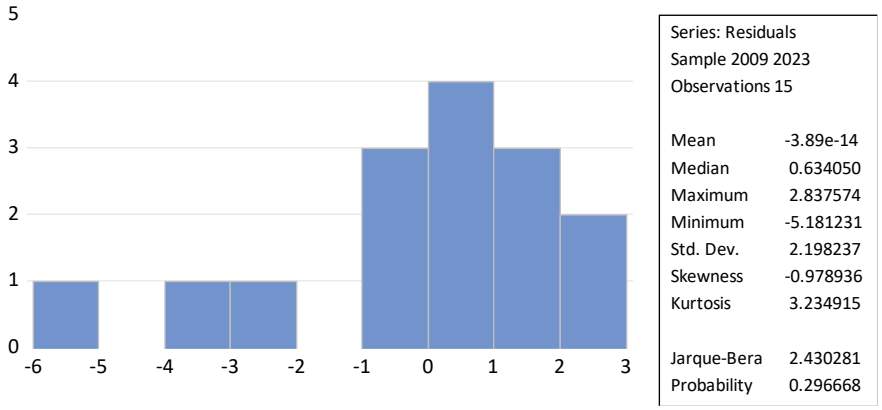

Sumber : estimate Eviews

Berdasarkan hasil uji normalitas residual pada tabel diatas diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 2,430281 dengan *probability* sebesar 0,296668 dimana > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini membuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors (VIF)
Date: 05/26/25 Time: 16:13

Sample: 2009 2023

Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1040.872	2538.658	NA
LN_PAJAK_DAERAH	21.60353	22705.41	9.445178
LN_BELANJA_PEG...	0.388849	373.2180	1.111252
LN_BELANJA_TIDAK...	18.16788	22087.39	9.115611

Sumber : estimate Eviews

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel pajak daerah, belanja pegawai dan belanja tidak langsung berada dibawah 10,00. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak menunjukkan gejala multikolinearitas diantara variabel-variabel penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

	Statistic	Test	Prob.
F-statistic	2.182542	F(3,11)	0.1477
Obs*R-squared	5.597019	Chi-Square(3)	0.1329
Scaled explained SS	3.363495	Chi-Square(3)	0.3389

Sumber : estimate Eviews

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1329 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari indikasi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Statistic	Value	Probability
F-statistic	0.196096	0.8254
Obs*R-squared	0.626359	0.7311

Sumber : estimate Eviews

Dari uji autokorelasi dapat dilihat bahwa prob 0,7311 > 0,05 maka bisa disimpulkan model penelitian ini tidak menunjukkan indikasi autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-49.74403	32.26255	-1.541851	0.1514
LN_PAJAK_DAERAH	7.698630	4.647960	1.656346	0.1259
LN_BELANJA_PEGAWAI	0.489703	0.623577	0.785313	0.4489
LN_BELANJA_TIDAK_LANGSUNG	-5.260408	4.262380	-1.234148	0.2429
R-squared: 0.345777				
Adjusted R-squared: 0.167353				
S.E. of regression: 2.479946				
Sum squared resid: 67.65144				
Log likelihood: -32.58147				
Akaike info criterion: 4.877529				
Schwarz criterion: 5.066634				
Hannan-Quinn crit.: 4.875518				
Mean dependent var: 2.314667				

Sumber : estimate Eviews

Uji Parsial (Uji – t)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa :

(1) Nilai probabilitas lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (2) Nilai probabilitas lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa Belanja Pegawai secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (2) Nilai probabilitas lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa Belanja Tidak Langsung secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Simultan (Uji – F)

Diketahui nilai *F-statistic* sebesar 1,937949 dengan probabilitas sebesar 0,181999 > 0,05. Maka dapat dinyatakan secara simultan pajak daerah, belanja pegawai dan belanja tidak langsung bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun nilai R-squared dalam penelitian ini adalah 0,345777 atau 34,57%, yang berarti variabel pajak daerah, belanja pegawai dan belanja tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 34,57%. Sedangkan sisanya sebesar 65,43% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan probability 0,1259 > 0,05 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar 7,698630. Hal ini menunjukkan pajak daerah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya pendapatan, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk investasi di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Pajak daerah juga memperkuat kapasitas fiskal daerah, menciptakan stabilitas ekonomi, dan mendukung pengelolaan kebijakan secara mandiri. Hubungan positif ini menegaskan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama jika dikelola secara efektif dan efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumaryani, 2019) yang mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Miswar et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Belanja pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan probability 0,4489 > 0,05 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar 0,489703. Fenomena ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai berkontribusi melalui pembayaran gaji dan tunjangan kepada aparatur sipil negara (ASN), yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, belanja pegawai turut menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan memberikan kepastian pendapatan bagi ASN, sehingga mendukung kelancaran perputaran ekonomi lokal. Meskipun pengaruhnya belum besar, belanja pegawai tetap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari kajian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2019) yang mengatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Fitri, 2019) yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probability 0,2429 > 0,05 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar -5,260408. Ini disebabkan oleh alokasi yang dominan pada gaji pegawai, bantuan sosial, dan subsidi yang bersifat konsumtif dan kurang mendorong produksi atau investasi. Ketidakseimbangan antara belanja konsumtif dan belanja produktif, seperti infrastruktur, dapat melemahkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi pengelolaan yang rendah serta ketidaktepatan sasaran juga mengurangi manfaat ekonomi. Ketergantungan pada bantuan tanpa strategi penguatan ekonomi masyarakat, ditambah perubahan kebijakan dan pemotongan anggaran yang tidak stabil, turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rudibdo & Sasana, 2017) yang menyatakan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (D. Purnomo et al., 2022) yang menyatakan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis, pajak daerah dan belanja pegawai di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja tidak langsung menunjukkan pengaruh negatif dan juga tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga instrumen fiskal tersebut belum mampu secara optimal mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah. Meskipun terjadi peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, efektivitasnya masih terbatas karena belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap output ekonomi.

Pemerintah daerah disarankan agar meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal dengan mengarahkan pajak daerah dan belanja publik ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Belanja pegawai perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas layanan publik, sementara belanja tidak langsung sebaiknya ditata ulang agar lebih efisien dan mendukung program pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Perencanaan anggaran yang lebih terukur dan berbasis kinerja akan menjadi kunci dalam memperkuat peran instrumen fiskal sebagai pendorong pembangunan ekonomi di Aceh.

DAFTAR REFERENSI

Aji, M. R. B. (2023). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 8*(1), 1-19. https://doi.org/10.60145/jcp.v1i9.208

Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis dampak teori Keynes dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA), 1*(1), 1-7. https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78

Bahari, F., & SBM, N. (2019). Analisis instrumen kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 17*(1), 1-8. https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.759

Boediono. (2014). *Ekonomi makro*. Unesa University Press. https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/teori-ekonomi-makro

Purnomo, G. D., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. *22*(8), 121-132.

Edira, R. (2020). Pengaruh belanja pegawai, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kota/kabupaten di Jawa Timur, *32*.

Fitri, N. (2019). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan Barat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi, 3*(1), 34-41.

Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. *2*, 153-169.

Pangestu, E. C. (2019). Pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 1*(1), 33-42. https://doi.org/10.20527/jiep.v1i1.1113

Prasetyo, P. E. (2011). *Fundamental makro ekonomi Yogyakarta*. Journal Beta Offset.

Rantebua, S., Rosnawintang, R., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), 5*(1). https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.11671

Rudibdo, R., & Sasana, H. (2017). Pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ekskaresidenan Semarang pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 2*(2), 215-226. https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.531

Sadono, S. (2008). *Makroekonomi teori pengantar*.

Sadono, S. (2012). *Makro ekonomi: Teori pengantar* (Edisi 4).

Saipuloh. (2021). Determinasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi. *3*(2), 158-175. https://doi.org/10.31933/jimt.v3i2

Siswajanthy, F., Shiva, K. A., & Salsabila, N. (2024). Analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Indonesia. *8*, 4360-4369.

Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh realisasi penerimaan pajak bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. *3*(November), 16-27. https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.84

Todaro, M. (2006). *Pengembangan ekonomi dunia ketiga*. http://dx.doi.org/10.21776/jdess